

ISLAM DAN KONSEP PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BERBASIS MULTIKULTURAL

Zainuddin

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang
Email : zazaadiva@gmail.com

DOI:

Received: November 2025

Accepted: Desember 2025

Published: Februari 2026

Abstract

Islam, as a universal religion, embodies fundamental values that emphasize justice, equality, tolerance, and respect for diversity. These values serve as an important foundation for institutional development amidst the reality of a multicultural society. This article aims to analyze the concept of multicultural-based institutional development from an Islamic perspective and its relevance in building inclusive and equitable institutions. The research method used is a literature study by examining classical and contemporary Islamic sources, as well as literature related to multiculturalism and institutional development. The results of the study indicate that Islam normatively and historically supports institutional management that respects cultural, ethnic, and religious differences, and encourages the creation of social harmony and cohesion. The concept of multicultural-based institutional development in Islam is not only theoretical but also applicable in addressing the social challenges of a pluralistic society. Therefore, the integration of Islamic values and the principles of multiculturalism can be a strategic approach to strengthening adaptive and sustainable institutions.

Keywords : Islam, Institutional Development, Multiculturalism, Islamic Values, Plural Society

Abstrak

Islam sebagai agama yang bersifat universal mengandung nilai-nilai fundamental yang menekankan keadilan, persamaan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam pengembangan kelembagaan di tengah realitas masyarakat yang multikultural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengembangan kelembagaan berbasis multikultural dalam perspektif Islam, serta relevansinya dalam membangun institusi yang inklusif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber keislaman klasik dan kontemporer, serta literatur terkait multikulturalisme dan pengembangan kelembagaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara normatif dan historis mendukung pengelolaan kelembagaan yang menghargai perbedaan budaya, etnis, dan agama, serta mendorong terciptanya harmoni dan kohesi sosial. Konsep pengembangan kelembagaan berbasis multikultural dalam Islam tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan sosial masyarakat majemuk. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dan prinsip multikulturalisme dapat menjadi pendekatan strategis dalam penguatan kelembagaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Islam, Pengembangan Kelembagaan, Multikulturalisme, Nilai-Nilai Islam, Masyarakat Majemuk

PENDAHULUAN

Melihat Kondisi pendidikan di Indonesia-termasuk pendidikan Islamnya-tidak memadai lagi untuk masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi paradigma pendidikan di Indonesia. Adapun paradigma pendidikan yang ditawarkan adalah paradigma pendidikan multikultural sebagai pengganti paradigma pendidikan yang monokultural.

Tawaran tentang pentingnya pendidikan multikultural ini dalam batas tertentu mendapat respon yang positif dari pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini terbukti dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,² yang mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia dan semangat multikultural (Bab III, pasal 4, ayat 1). Bahkan nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan Pendidikan Nasional, sebagaimana yang termaktub pada Bab III pasal 4, ayat 1: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Mengingat penyelenggaraan pendidikan memerlukan kurikulum, maka nilai-nilai multikultural tersebut harus dijadikan dasar dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum suatu lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah, madrasah, maupun pesantren.

Kurikulum juga mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan kepada tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Sehingga kurikulum menjadi elemen pokok dalam sebuah layanan program pendidikan. Kurikulum juga memiliki peranan penting dalam pendidikan, kaitannya yaitu dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Dengan kata lain kurikulum menjadi syarat mutlak dari pendidikan dan kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Sehingga sangatlah sulit dibayangkan bagaimana bentuk pelaksanaan suatu pendidikan tanpa adanya kurikulum.

Namun demikian, prinsip pengembangan kurikulum yang bermuatan multikultural tersebut tidak perlu dijabarkan secara eksplisit dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP, PP No. 19 Tahun 2005), yang terdiri atas 8 (delapan) standar, yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Agaknya, penjabaran secara detail dan eksplisit tentang nilai-nilai multikultural diserahkan kepada para pengelola pendidikan – baik di sekolah, mad-

rasah, maupun di pesantren sesuai dengan karakter kurikulum daerah masing-masing.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis pengembangan kurikulum berbasis Pendidikan Islam Multikultural. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen. Penelitian ini berfokus pada sumber utama, yaitu buku *Manajemen Pendidikan Nasional* karya Tilaar dan *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Analisis Kritis Terhadap Proses Pembelajaran* karya Maskuri Bakri. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam bidang Pendidikan Islam Multikultural. Subjek penelitian ini adalah gagasan-gagasan pendidikan yang terdapat dalam karya kedua tokoh tersebut dan implementasinya dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam Multikultural. Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi nilai-nilai etika dan rasionalitas pendidikan yang dikemukakan kedua tokoh, serta menafsirkan makna dan konteksnya melalui pendekatan historis-filosofis. Hasil analisis kemudian direfleksikan pada konteks pengembangan kurikulum berbasis Multikultural.

PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan Multikultural

Dalam makalah ini penulis tidak membahas pengertian Pendidikan multikultural, namun hal terpenting yang perlu digaribawahi dalam praktek pendidikan multikultural bahwa seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mata pelajaran yang diajarkan, namun seorang guru juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme.

Pendidikan multikultural merupakan model pendidikan yang menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada peserta didik seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras, maka perlu mempertimbangkan beberapa hal, sebagaimana yang dikemukakan Tilaar, sebagai berikut:*

Pertama, pendidikan multikultural secara *inhern* sudah adasejak bangsa Indonesia ini ada. Falsafah bangsa Indonesia adalah bhineka tunggal ika, suka gotong

* Tilaar, H.A.R. *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) hlm. 53

royong, membantu, dan menghargai antar satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam potret kronologis bangsa ini yang sarat dengan masuknya berbagai suku bangsa asing dan terus berakulturasi dengan masyarakat pribumi. Misalnya etnis cina, etnis arab, etnis afrika dan sebagainya. Semua suku itu ternyata secara kultural telah mampu beradaptasi dengan suku-suku asli negara Indonesia. Misalnya suku jawa, batak, bugis, makassar, tolaki, dayak, dan suku lainnya.

Kedua, pendidikan multikultural memberikan secerach harapandalam mengatasi berbagai gejala masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Pendidikan multikultural, adalah pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, heterogenitas, pluralitas dan keragaman, apapun aspeknya dalam masyarakat.

Ketiga, pendidikan multikultural menentang pendidikan yang beorientasi bisnis. Pada saat ini, lembaga pendidikan baik sekolah atau perguruan tinggi berlomba-lomba menjadikan lembaga pendidikannya sebagai sebuah institusi yang mampu menghasilkan *income* yang besar, dengan alasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik. Padahal semua orang tahu, bahwa pendidikan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia bukanlah pendidikan keterampilan belaka, melainkan pendidikan yang harus mengakomodir semua jenis kecerdasan yang sering dikenal dengan nama kecerdasan ganda (*multiple intelligence*).

Keempat, pendidikan multikultural sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan. Kekerasan muncul ketika saluran kedamaian sudah tidak ada lagi. Kekerasan tersebut sebagai akibat dari akumulasi berbagai persoalan masyarakat yang tidak terselesaikan secara tuntas dan saling menerima. Ketuntasan penyelesaian berbagai masalah masyarakat adalah prasyarat bagi munculnya kedamaian. Fanatisme yang sempit juga bisa menyebabkan munculnya kekerasan. Fanatisme ini juga berdimensi etnis, bahasa, suku, agama, atau bahkan sistem pemikiran baik di bidang pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.[†]

Oleh karena itu, Menurut Tholchah Hasan *Tasamuh, Tawazun dan Tawazun* menjadi salah satu sikap dasar dan karakter ajaran Islam, sehingga Islam disebut sebagai agama kasih sayang. Prinsip atau dasar hubungan orang Islam dengan non Muslim sudah disebutkan dalam sejumlah ayat, diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 159 sebagai berikut: (Muhammad Tholchah Hasan, 2016: 66)[‡]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

[†] Tilaar. *Multikulturalisme tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004) hlm. 66-67

[‡] Tholchah Hasan. Muhammad, *Pendidikan Multikultural sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*, (Malang: Lembaga Penerbitan UNISMA, 2016) hlm. 66

Kerangka Pengembangan Pendidikan Agama Islam Multikultural

Aspek Kelembagaan

Lembaga pendidikan Islam dirancang sebagai lembaga pendidikan yang inklusif, membuka diri kepada seluruh calon peserta didik tanpa melihat latarbelakang budaya bahkan agamanya, mereka semua memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pembelajaran dan pendidikan di lembaga tersebut. Karena pada dasarnya mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi ilmu pengetahuan dari siapapun datangnya.

Pengelolaan lembaga pendidikan Islam, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang memberi peluang terhadap berkembangnya nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan toleransi. Di samping berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan konsensus, manajemen lembaga juga harus tetap memperhatikan keberagaman tujuan masing-masing individu yang terlibat dalam lembaga tersebut, sehingga semua elemen dalam pengelolaan pendidikan merasa diapresiasi kepentingan dan tujuannya di lembaga tersebut.

Visi lembaga dirumuskan dengan memperhatikan nilai-nilai multikulturalisme, misalnya: Mencetak Generasi Cendekia Religius, Inklusif, Demokratis, Toleran, Inovatif, Mandiri dan Berkarakter. Dengan visi tersebut mencerminkan bahwa lembaga pendidikan Islam tersebut berwawasan multikulturalisme.

Aspek Kurikulum

a. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi materi Pendidikan Agama Islam meliputi: Peserta didik memahami al-Qur'an, Sunnah dan ajaran yang dikandungnya secara benar, memahami sejarah Islam dan makna yang dikandungnya, memiliki sikap ketakwaan, inklusif, dan toleran terhadap perbedaan, serta mampu menjalankan ajaran agama secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan manusia dan alam lingkungannya.

b. Materi PAI

- 1) Al-Qur'an dan Sunnah
- 2) Aqidah
- 3) Fiqh
- 4) Akhlak-Tasawuf
- 5) Sejarah Peradaban Islam
- 6) Pandangan Dunia Islam
- 7) Islam dan Pluralisme
- 8) Islam dan Demokrasi
- 9) Islam dan Pengarusutamaan Gender
- 10) Islam dan HAM, dan isu kontemporer lainnya

c. Proses Pembelajaran

Pembelajaran berorientasi pada peserta didik, dengan memberikan peluang yang sama kepada seluruh peserta didik yang plural untuk mengembangkan potensi dirinya dan berprestasi. Pendidik, memfasilitasi terciptanya iklim demokratis, dan toleransi. Kelas di kelola secara dinamis, yang memungkinkan terciptanya situasi yang nyaman dalam berinteraksi dan berkomunikasi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik. Prinsip syura, musawah, adalah, tasamuh, tawasuth, dan tawâzun dijadikan sebagai kerangka dasar dalam proses pembelajaran.

d. Sumber Belajar

Sumber belajar dirancang variatif yang mencerminkan keragaman, dan memungkinkan peserta didik memahami keragaman pendapat ahli dan keyakinan yang plural. Dalam konteks pluralitas keyakinan dan agama, peserta didik memperoleh peluang untuk belajar dari sumber aslinya, memahami lambang-lambang keagamaan yang plural dan segala aktifitasnya.

e. Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian kompetensi dasar pada masing materi dan standart kompetensi PAI, dibu-tuhkan instrumen evaluasi yang dapat mencakup terhadap tiga ranah pengetahuan; koginitif, afektif dan psikomotorik, dalam hal ini dapat digunakan tes prestasi melalui teknik studi kasus dan observasi. Dengan tes prestasi ini, maka keterlibatan seluruh unsur, pendidik, pimpinan lembaga, dan orang tua sangat penting, karena observasi non akademik tidak cukup di lingkungan sekolah melainkan dilakukan juga di luar sekolah.

Aspek Ketenagaan

Rekrutmen tenaga pendidik, dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuannya, komitmennya terhadap etika profesi, dan komitmennya terhadap nilai-nilai multikulturalisme.

Oleh karena itu, Sistem pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu membangun suatu masyarakat madani yang makmur dan berkeadilan. Melalui sarana investasi sumberdaya manusia "*human capital invesmet*" outputnya diharapkan memiliki berbagai karakteristik antara lain *social, managerial, technological, moral capital and intelectual capital*.[§]

Social Capital, manusia yang memiliki kemampuan untuk membuat, berada dan beraktifitas dalam suatu jaringan, berwatak jujur, suka bekerja keras, kreatif, inovatif dan demokratis. Demokrasi sebagai *social capital* hanya dapat dikembangkan melalui proses pendidikan yang menghormati nilai-nilai demokrasi tersebut.

^{§§} Maskuri Bakri. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Analisis Kritis Terhadap Proses Pembelajaran*. (Surabaya: Visipress Media, 2017) hlm, 11-12

Managerial Capital yaitu sumberdaya yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang tangguh, mampu merancang dan melaksanakan manajemen strategis, kewirausahaan, motivasi, dan selalu mendorong untuk maju. *Teknologil Capital* yaitu sumberdaya manusia yang trampil, memiliki kecakapan teknis, berorientasi pada pencapaian tujuan, berfikir dan bertindak efektif serta efisien.

Moral Capital, adalah manusia yang sanggup *amar ma'ruf nahi munkar*, dengan menempatkan Tuhan sebagai sumber nilai, yang kehendak-Nya merupakan norma-norma yang mesti diikuti dan menempatkan-Nya sebagai tujuan akhir serta motif bagi setiap tindakan moral, karena moral adalah tindakan relegius pada tindakan seseorang yang merupakan suatu fenomena kemanusiaan yang universal.

Intelektual Capital adalah segala sesuatu yang diketahui oleh individu dan merupakan kekuatan berfikir yang mudah untuk diidentifikasi dan digelar sebagai kekuatan yang masif, sehingga dapat memberi daya saing.

Strategi Pengembangan Pendidikan Agama Islam

Kebijakan otonomi dan desentralisasi Pendidikan Islam

Otonomi daerah sebagai bagian dari sistem politik pemerintah Indonesia melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah, yakni UU RI No. 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini telah membawa perubahan dalam tatanan pemerintahan, terutama dengan diserahkannya sejumlah kewenangan kepada daerah, yang semula menjadi urusan pemerintah pusat.**

Pemahaman mengenai desentralisasi berkaitan berbagai perspektif, Menurut Kacung Marijan, terdapat tiga perspektif.†† adalah perspektif politik. Di dalam perspektif ini desentralisasi ditempatkan dalam *Pertama*, konteks relasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan demokrasi di daerah. *Kedua*, perspektif administrasi yang lebih cenderung untuk membahas desentralisasi dalam konteks pembagian kewenangan antara lembaga-lembaga atau agen-agen di pemerintahan daerah. *Ketiga*, perspektif ekonomi. Di dalam perspektif ini desentralisasi dipahami dalam dua hal. *Pertama*, desentralisasi adalah berkaitan dengan pembagian sumberdaya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau yang disebut desentralisasi fiskal. *Kedua*, desentralisasi adalah privatisasi pelayanan publik. Bidang pendidikan salah satu kewenangan yang secara administratif diberi kebebasan dalam beberapa hal.

Jika ditinjau dari penyelenggaraan otonomi daerah dalam dunia pendidikan membawa implikasi terhadap desentralisasi pendidikan serta pendidikan berbasis masyarakat. Penyelenggaraan desentralisasi pendidikan dan pendidikan bermasyarakat akan berjalan dengan baik jika isu-isu kebijakan pendidikan nasional seperti masalah mutu, pemerataan, relevansi, masalah guru,

** Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2015), hlm. 158

†† Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm. 138

sarana dan fasilitas, kesenjangan, kurikulum, dan isu-isu lainnya berhasil direkonstruksi.##

Kebijakan Demokratisasi Pendidikan

Di era reformasi banyak di antara masyarakat yang menentang jenis kekuasaan yang menentang segala jenis kekuasaan yang disalahgunakan dan tindakan-tindakan otoriter. Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai akan potensi individu yaitu individu yang berbeda dan individu yang mau hidup bersama, segala jenis homogenisasi masyarakat yaitu menyamaratakan anggota masyarakat menuju kepada uniformitas adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup demokrasi.

Dalam bidang pendidikan semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik, mempunyai kewajiban yang sama untuk membangun pendidikan nasional berkualitas. Demokrasi pendidikan berarti mengembangkan pendidikan yang didasarkan kepada kehidupan nyata di daerah. Demokrasi bukan hanya masalah prosedur atau susunan pemerintahan, tetapi juga merupakan tidak lain adalah nilai-nilai yang mengakui akan kehormatan atau martabat manusia (*human dignity*). Oleh sebab itu proses pendidikan nasional dapat dirumuskan sebagai proses homonisasi dan humanisasi. Pendidikan bukan hanya sekedar mnghidupi peserta didik tetapi juga mengembangkannya sebagai manusia (*human being*). Pendidikan nasional termasuk pendidikan Islam bukanlah untuk melahirkan robot-robot yang hanya menerima petunjuk dan restu dari atas tetapi pendidikan yang mengembangkan pribadi-pribadi yang kreatif, kritis, inovatif dan produktif tidak dibatasi oleh golongan, ras, etnis, jenis agama dan tempat (Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, 2003)^{§§}

Strategi Pengembangan PAI berbasis multikultural

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural berorientasi pada materi

Pendidikan multikultural memperkaya kurikulum yang sudah berjalan. Pengayaan itu dapat dilihat pada bagaimana pendidikan multikultural dapat dikembangkan. Pengembangan kurikulum Pendidikan multikultural berorientasi materi dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kontribusi, pendekatan aditif, pendekatan transformative, dan pendekatan aksi sosial.^{***}

Pendekatan *kontributif* dilakukan dengan cara menseleksi buku-buku teks wajib atau anjuran. Dalam konteks pendidikan agama, tujuan utama pendekatan kontribusi terhadap muatan kurikulum adalah untuk memasukkan materi-materi tentang keragaman

Dalam pembelajaran pendidikan multikultural di lembaga pendidikan keagamaan, perilaku yang dicontohkan oleh para pimpinan pendidikan. Menurut Mastatho' merancang strategi hubungan multikultural dan etnik dalam sekolah dapat dilakukan melalui pengalaman pribadi kelompok-

^{‡‡} Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*,..... hlm. 158

^{§§} Maskuri Bakri. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Analisis Kritis Terhadap Proses Pembelajaran*. (Surabaya: Visipress Media, 2017) hlm 57

^{***} Zakiyuddin Baidhawi. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. (2005) hlm. 345

kelompok keagamaan, termasuk kelompok-kelompok kultural dan kelompok-kelompok etnik dalam pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang keragaman kelompok tersebut. Pendekatan ini menambahkan muatan multikultural pada kurikulum standar.

Pendekatan *aditif*, pendidikan agama Islam memanfaatkan muatan-muatan khas multikultural sebagai memperkaya bahan ajar, konsep-konsep tentang harmoni, dan kehidupan bersama antarumat beragama. Muatan-muatan yang telah baku dalam kurikulum didekati dan diajarkan lewat berbagai perspektif sehingga siswa dapat melihat sesuatu yang lain.

Pendekatan *transformatif* mengembangkan muatan kurikulum melalui berbagai disiplin ilmu pengetahuan, menggabungkan berbagai sudut pandang dan perspektif yang beragam dalam kurikulum.

Pendekatan *aksi sosial* mengkombinasikan pendekatan transformatif dengan aktivitas-aktivitas yang berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Dalam konteks ini pendidikan agama tidak sekedar menginstruksikan siswa untuk memahami dan mempertanyakan isu-isu sosial, namun sekaligus juga melakukan sesuatu yang penting berkenaan dengan isu tersebut.

Pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural berorientasi pada siswa

Pengembangan kurikulum ini dirancang untuk membantu siswa secara kultural dan keagamaan untuk melakukan transisi ke dalam mainstream pendidikan. Program ini dapat mengambil bentuk:

Pertama, Program yang menggunakan penelitian gaya belajar berbasis kultur keagamaan dalam upaya menentukan cara pengajaran mana yang digunakan untuk kelompok siswa tertentu. Program ini memerlukan survey mengenai sejauh mana pengaruh kultur keagamaan terhadap cara belajar efektif para siswa.

Kedua, Program lintas batas. Studi bersama antaragama, studi bersama antaretnik, studi bersama antar gender. Program ini menitikberatkan pada upaya guru untuk membawa siswa agar mengalami langsung interaksi dalam keragaman.

Pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural berorientasi pada sosial

Tipe pengembangan kurikulum ini menekankan relasi antar manusia dalam semua bentuknya. Pembaharuan kurikulum untuk menekankan kontribusi sosial yang positif dari setiap kelompok-kelompok agama, etnik dan kultur.^{†††}

Pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan pengembangan multikultural didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat
- b. Keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum, seperti tujuan, konten, proses dan evaluasi.

^{†††} Zakiyuddin Baidhawi. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. (2005) hlm. 116

- c. Budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan obyek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa.
- d. Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.^{##}

Pengembangan kurikulum meliputi penetapan tujuan, penyusunan silabus dan materi Pendidikan Agama Islam, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, sumber belajar dan jenis penilaian yang bermuatan multikultural.

Dalam penjelasan lain Model pembelajaran multikultural menawarkan pendekatan dengan menekankan pentingnya pluralisme sosial, keragaman budaya, etnik, dan kontekstualisme. Implementasi pendekatan ini menegaskan hal-hal sebagai berikut: pandangan sosio-antropologis menjadi dasar mengkaji karya seni dan pengalaman budaya dari pembuat atau penciptanya. Artinya, memusatkan perhatian terhadap pengetahuan pembuat atau pencipta seni sama baiknya dengan pemahaman terhadap konteks sosiobudayanya. Oleh karena itu, mengajar seyogyanya dipandang sebagai intervensi sosial dan budaya. Dengan demikian, dalam setiap upaya pengajaran guru tidak hanya mempertentangkan, tetapi secara konsisten menyadari bias sosial-budayanya.^{\$\$\$}

Dalam pendekatan multikultural, proses pendidikan dipusatkan pada siswa atau komunitas tertentu, yang memungkinkan guru memahami keyakinan serta nilai-nilai sosio-budaya siswa dalam konteks kebudayaan masyarakat, ketika akan merancang model pembelajarannya. Untuk itu, perlu diidentifikasi penggunaan pendidikan yang tanggap budaya, yang dapat menunjukkan perbedaan etnik dan sosio-budaya di kelas, masyarakat, dan nasional.

Dengan demikian, disarankan untuk memusatkan perhatian pada kompleksitas yang dinamis dari berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi manusia, seperti fisik, mental, kemampuan, kelas, jender, usia, politik, agama, dan etnisitas. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan model pembelajaran multikultural, adalah : (1) Guru terlebih dahulu memperbaiki sikap negatif yang mereka mungkin miliki terhadap pluralisme sosial, keagamaan, dan etnis; (2) Guru dan siswa melakukan analisis situasi agar akrab dengan masyarakat; (3) Guru dan siswa memilih materi yang relevan dan sekaligus menarik; (4) Guru dan siswa, bersama-sama, menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan materi yang dipilih. Dalam hal ini, disarankan mengidentifikasi persoalan sosial yang berkaitan dengan agama, suku, kehidupan ekonomi, kemampuan, mental serta fisik untuk membangun masyarakat yang demokratis.

^{##} Yaya Suryana dan H.A Rusdiana. (2015). *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa, Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. (Bandung: 2015 Pustaka Setia) hlm. 247

^{\$\$\$} Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: 2012 Grasindo). Hlm. 231

Kesimpulan

Pendidikan multikultural adalah sebuah model pendidikan yang dilaksanakan untuk menghasilkan output pendidikan yang memiliki kesadaran toleransi tinggi, menerima perbedaan yang terjadi di masyarakat dan pengagum hak asasi manusia. Pendidikan multikultural secara konseptual dapat dilaksanakan sebagaimana sistem pendidikan lainnya. Melalui perubahan dimensi kurikulum, pola pengajaran dan sistem evaluasi. Pendidikan multikultural seyogyanya juga diikuti dengan kebijakan sosial yang inklusif terhadap perbedaan. Pendidikan multikultural tidak perlu dihadapkan kepada realitas-realitas keagamaan yang jauh dari nilai-nilai nasionalisme.

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan Multikulturalisme bisa diimplementasikan dengan syarat kesadaran masyarakat Islam akan multikulturalisme lebih awal tumbuh. Hingga saat ini, kesadaran multikulturalisme masyarakat Islam hanya terjalin dalam kaitan etnisitas dan kebudayaan, tidak pernah mengawinkan aspek keberagaman dan keberagaman ritus keagamaan. Pendidikan Islam berbasis multikulturalisme, berarti mengembalikan sejarah Nabi Muhammad yang mau merangkul seluruh suku, golongan, dan agama melalui 'Piagam Madinah', sebuah Undang-Undang Islam kedua setelah al-Qur'an. Karena piagam tersebut hasil dari dialektika Nabi dengan kondisi suatu zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra. Azyumardi, "Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia", <http://www.kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm>.
- Baker G.C. 1994. *Planning dan Organizing for Multicultural Instruction*. (2nd). (California: Addison-Else Publishing Company. 1994)
- Bakri, Maskuri. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Analisis Kritis Terhadap Proses Pembelajaran*. (Surabaya: Visipress Media, 2017)
- Banks, James A. *An Introduction to Multicultural Education*. (Boston: Allyn and Bacon. 2001)
- Ernie Isis Aisyah Amini, *Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi pada Siswa SLTP di Kota Mataram*, (Mataram: Program Pascasarjana IKIP Negeri Singaraja, 2004).
- Hanum. Farida. *Fenomena Pendidikan Multikultural pada Mahapeserta didik Aktivois UNY*. Laporan Penelitian. 2005 Lemlit UNY.
- Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2015)
- inurrofiq Dawam, *Pendidikan Multikultural*, (Jogjakarta: Inspeal Ahimsa Karya Press, 2006),
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Kencana: Jakarta, 2010)
- Kymlicka, W. & He, B. (Eds.). 2005. *Multiculturalism in Asia*. New York: Oxford University Press: 2005)

- Maksum. Ali, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011),.
- Musa Asy'arie.. "Pendidikan Multikultural dan Konflik 1-2". 2004. www.kompas.co.id.
- Parekh. Bhikhu, *Rethinking Multikulturalism keberagaman Budaya dan Teori Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008)
- Sulalah. *Pendidikan Multikultural dialektika Nilai-nilai Universitas Kebangsaan*. (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011)
- Suparlan, 2003. "Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?" *Antropologi Indonesia*, Tahun XXVII, No. 72, September-Desember 2003)
- Suparlan. Parsudi, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", *Makalah pada Simposium internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3*. (Universitas Udayana Denpasar Bali, 2002
- Tholchah Hasan. Muhammad, *Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*. (UNISMA: Malang 2016)
- Tholchah Hasan. Muhammad, *Pendidikan Multikultural sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*, (Malang: Lembaga Penerbitan UNISMA, 2016)
- Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)
- Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: 2012 Grasindo)
- Tilaar. *Multikulturalisme tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004)
- Tilaar. H.A.R, *Multikulturalisme Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia. 2004)
- Yaya Suryana dan H.A Rusdiana. *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa, Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. (Bandung: 2015 Pustaka Setia)
- Zakiyuddin Baidhawi. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. (2005)
- Zakiyuddin. Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jogjakarta: Rihlah Group, 2012
- Zakiyudin Baidhawi, *Pendidikan Islam Multikulturalisme*, (Jakarta: PT Erlangga, 2005)